

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2017 – 2018



R E N S T R A

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi
Telp; Fax. (021) 88959980
Website : diskominfo.bekasikota.go.id



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telepon (021) 88961767 Fax 8895 9980

B E K A S I

Kata pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, kami Tim Penyusun Renstra pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang dibentuk dengan keputusan Walikota No. 050.3/Kep.54.A Diskominfo/II/2017 Tahun 2017 telah menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penyusunan Renstra tahun 2017-2018.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Kota Bekasi tahun 2013-2018 yang diimplementasinya oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, dalam kurun waktu 2 tahun, Sesuai Visi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, yaitu : **“Kota Bekasi yang Informatif, Kreatif, Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi”** adapun sasaran dan target kinerja dimaksud dalam rangka mewujudkan visi Kota Bekasi yaitu **“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”**.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika telah tersusun. Dan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra ini.

Bekasi, 2017
Ketua Tim Penyusun Renstra

Dr. Dr. Hj. TITI MASRIFAHATI, MKM

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	8
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	14
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	27
3.2 Telaah visi. Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi	27
3.3 Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Barat	29
3.4 Telaah RTRW	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	34
4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	34
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi informatika Statistik dan Persandian	34
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	43
5.1 Rencana Program dan dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Atastatik dan Persandian Tshun 2017-2018.....	43
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
BAB VII PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan telah berubah ke arah desentralisasi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional, seiring dengan digulirkannya semangat reformasi melalui perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari “*rule government*” menjadi “*good governance*”, dari sentralistis (terpusat) ke desentralistis (otonomi daerah). Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di alam demokrasi. Salah satu ciri dari demokrasi adalah keterbukaan informasi publik. Eskalasi kebutuhan informasi bagi publik makin terasa dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesatnya. Dalam tatanan kemasyarakatan telah terbentuk sebuah dunia tanpa batas (*borderless world*) yaitu pola komunikasi masyarakat dengan akses komunikasi dan informasi yang luas dan terbuka. Keterbukaan ini tentunya harus disikapi secara baik oleh Pemerintah dengan mengubah pola komunikasi konvensional yang cenderung satu arah menjadi pola komunikasi aktif adaptif secara dua arah dengan masyarakatnya.

Hal inilah kemudian yang mendorong terjadinya restrukturisasi organisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi Dan Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang merupakan penggabungan dari beberapa urusan dan kewenangan yaitu urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang awalnya di Bagian Telematika, urusan kehumasan dan Persandian pada Bagian Humas, urusan pos dan telekomunikasi pada Dinas Perhubungan serta urusan statistik.

Perubahan situasional ini tentunya akan memunculkan beragam isu-isu strategis baik secara internal maupun eksternal terutama berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Harus dijalin sebuah pola komunikasi dan penyampaian informasi dengan penguatan Teknologi Informasi berbasis data yang akan menciptakan sebuah sinergitas pembangunan antara Pemerintah dengan masyarakatnya dalam mewujudkan Visi Kota Bekasi yang **“Maju, Sejahtera dan Ihsan”**. Dimana “Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju, “Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera, dan “Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupaya untuk memberikan layanan-layanan informasi berupa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi serta layanan informasi dan komunikasi publik bagi masyarakat Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi periode 2017 s/d 2018 dibuat dengan menggunakan pendekatan sistem manajemen strategis (Strategic Management System) dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 / PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota/Kota;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 24 Tahun 2010 tentang

- perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 10 Desember 2013 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
 34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2005-2025;
 35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
 36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2013-2018;
 38. Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
 39. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta Statistik dan Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bekasi adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan sebagai sebuah Dinas yang baru terbentuk untuk kurun waktu dua tahun kedepan, sehingga sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan;
3. Untuk menjaga kesinambungan program-program kerja dari beberapa urusan yang saat ini telah disatukan.
4. Mewujudkan pencapaian Bekasi Smart City pada tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar Belakang penyusunan Renstra. Landasan Hukum yang menjadi dasar dan yang melandasi Renstra. Maksud dan Tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Bab III

ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Telahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Telahan Rencana serta Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini Menyajikan Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Strategi dan Kebijakan.

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini Menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.

Bab VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini Menyajikan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Bab VII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian

Mengacu pada Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

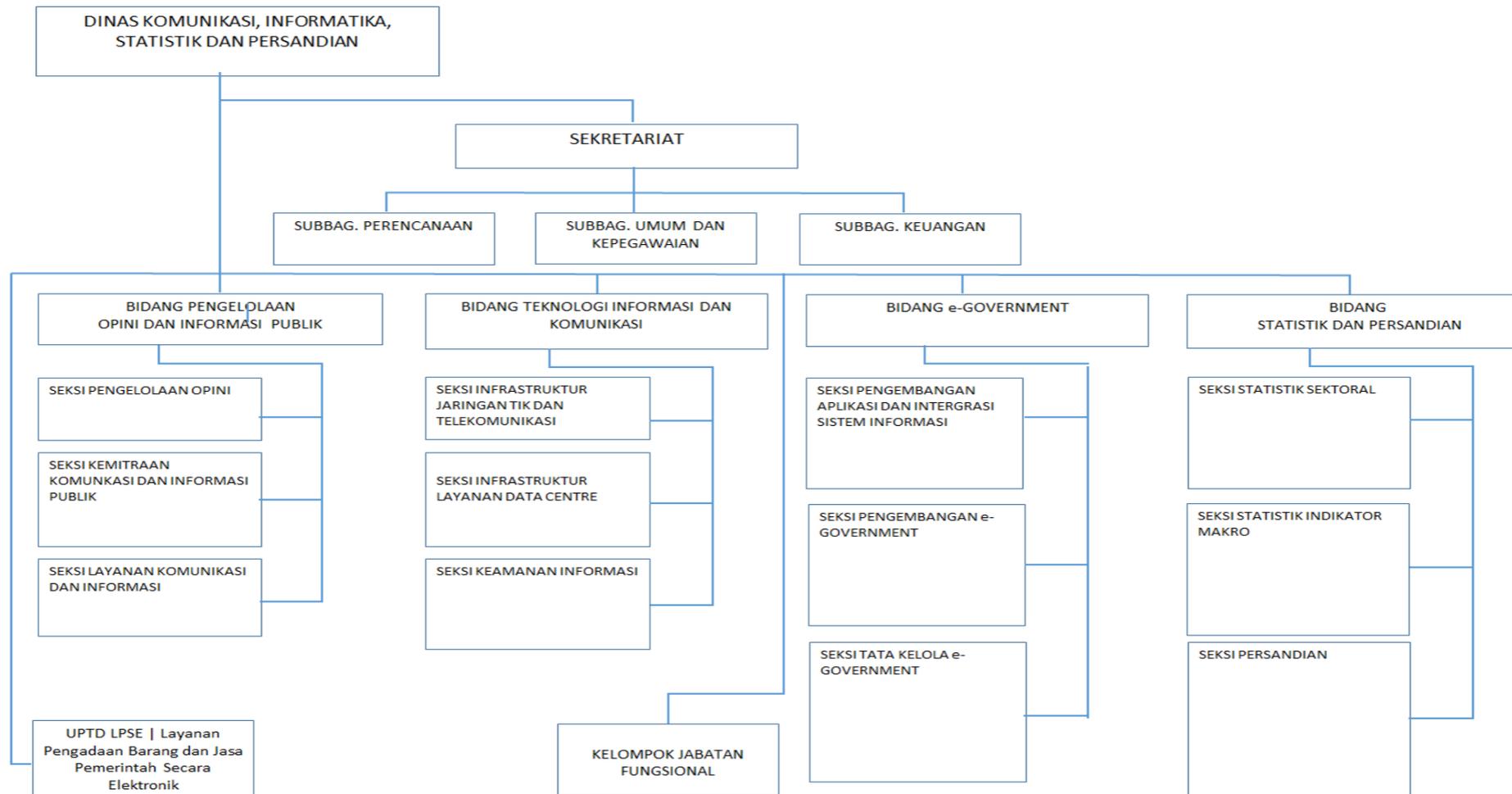
Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- b. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas.

Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik;
 3. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi , membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Infrastruktur Layanan Data *Centre*;
 3. Seksi Keamanan Informasi.
- e. Bidang e-Government, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengembangan e-Government;
 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
- f. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
 1. Seksi Statistik Sektor;
 2. Seksi Statistik Indikator Makro;
 3. Seksi Persandian.
- g. UPT LPSE.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi, sebagai Berikut :



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, meliputi :

a. Aparatur

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki pegawai sebanyak 71 orang Pegawai, yang terdiri atas :

1. Pegawai Negeri Sipil

Jumlah = 51 Orang

Berdasarkan Golongan

-	Golongan IV
	= 8 Orang
-	Golongan III
	= 36 Orang
-	Golongan II
	= 7 Orang
-	Golongan I
	= - Orang

Berdasarkan Pendidikan Formal

-	Setingkat S3
	= 2 Orang
-	Tamat S2
	= 16 Orang
-	Tamat S1
	= 23 Orang
-	Tamat D3
	= 2 Orang
-	Tamat SMA sederajat
	= 7 Orang
-	Tamat SMP sederajat
	= 1 Orang

2. Pegawai Tidak Tetap

Jumlah = 20 Orang

Pendidikan Formal

-	Tamat S1
	= 15 Orang
-	Tamat D3
	= 2 Orang
-	Tamat D1
	= - Orang
-	Tamat SMA sederajat
	= 3 Orang

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																												
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN											MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML
a	b												c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	e			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12	Seksi Infrastruktur Pusat Data Centre									√													√							
13	Seksi Keamanan Informasi									√													√							
14	Kepala Bidang E-Government									√															√					
15	Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi										√														√					
16	Seksi Pengembangan E-Government								√														√							
17	Seksi Tata Kelola E-Government								√														√							
18	Kepala Bidang Statistik dan Persandian									√														√						
19	Seksi Statistik Sektoral									√															√					
20	Seksi Statistik Indikator Makro								√														√							
21	Seksi Persandian									√															√					
22	UPT LPSE								√														√							
23	Kelompok Jabatan Fungsional		1	7			2		14	5							1	2	4	2	2	11	4	1						
JUMLAH			1	7			2		23	16	2						1	2	4	2	2	11	13	7	5	1	1	1		

Dari tabel/bagan di atas dapat dilihat bahwa dari tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang S1 menempati peringkat pertama dalam jumlahnya, yakni sebanyak 23 pegawai. Sementara pegawai yang tingkat pendidikannya sampai pada jenjang SMU menempati peringkat 3, yakni sebanyak 7 pegawai. Disusul oleh pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan S2, yakni sebanyak 16 orang, dan sisanya ditempati oleh 2 orang berpendidikan D3, 1 orang menempati tingkat pendidikan SMP, dan 2 orang pegawai berpendidikan S3. Dari jumlah tersebut kita dapat melihat bahwa kualitas sumber daya manusia telah memenuhi syarat ataupun klasifikasi yang sudah ditentukan sebagai standarisasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kota Bekasi, bahkan sampai pada Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi para pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menggunakan Analisis Jabatan, yang artinya bahwa penugasan yang dilaksanakan para pegawai telah sesuai dengan Analisis Jabatan yang sudah ditentukan oleh pimpinan langsung pegawai yang bersangkutan. Diharapkan dengan Analisis Jabatan ini, para pegawai dapat lebih bertanggung jawab terhadap tugas, pokok dan fungsi masing-masing, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Permasalahan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada bidang kepegawaian adalah kekurangan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi/kemampuan di bidang Teknologi Informasi, dan tingkat kesejahteraan jika dibandingkan dengan beban tugas dan resiko kerja. Sebagai saran, salah satu solusinya adalah penerapan remunerasi, yakni manajemen kepegawaian yang berkesinambungan, antara kualitas kinerja, kehadiran serta kesejahteraan sebagaimana telah dilaksanakan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Departemen Keuangan serta ujicoba pada Departemen Dalam Negeri (hasil memuaskan). Diharapkan Kota Bekasi ke depannya dapat mengadaptasi sistem seperti ini, sehingga kualitas kinerja, disiplin pegawai, serta kesejahteraannya dapat meningkat, yang juga akan berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat yang akan meningkat pula seiring dengan Visi dan Misi Kota Bekasi, yakni Maju, Sejahtera dan Ihsan.

b. Sarana dan prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki aset yang merupakan limpahan aset dari perangkat daerah sebelumnya yaitu Bagian Telematika, Bagian Humas (Persandian), Dinas Perhubungan (Pos dan Telekomunikasi) berupa kendaraan Dinas (mobil dan motor), inventaris kelengkapan kantor, komputer beserta kelengkapannya.

c. Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan informasi dan komunikasi publik maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah membuka jalur komunikasi publik, sebagai berikut :

1. Fitur Tanya Jawab pada Website kota bekasi
 - POT : <http://pengaduan.bekasikota.go.id/>
 - <http://sorot.id>
2. Manajemen email : lpse@bekasikota.go.id
3. Manajemen email : kominfo@bekasikota.go.id
4. Website : diskominfo.bekasikota.go.id
5. Twitter : @KominfoBekasi
6. Instagram : [diskominfobekasi](https://www.instagram.com/diskominfobekasi)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, selain mengacu dapat RJPMD Kota Bekasi 2013-2018 juga mengacu pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008).

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2016, maka untuk melihat capaian kinerja Pelayanan tidak terlepas dari Perangkat Daerah sebelumnya yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Telematika dan Bagian Humas), Dinas Perhubungan (Bidang Pos dan Telekomunikasi) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (yang terkait dengan urusan Statistik) yang dapat di lihat pada tabel 2.1

Untuk capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 2.2

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Sampai Akhir tahun 2016 tidak ada, target SPM 1 Kelompok, capaian sebesar 0 persen.
2. Media Luar Ruang
Target per tahun 12 kali/tahun dan tercapai 12kali/tahun, capaian 100 persen.
3. Media Masa target sebesar 76 kali per tahun tercapai 72 kali sehingga capaian 95 persen.

Secara lengkap dapat dilihat dalam **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
Tahun 2014-2016

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN TAHUN					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	SPM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Permen Kominfo No.22/PER/M.KO MINFO/12/2010)																			
	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional																			
	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui; a. Media massa, seperti; majalah, radio dan televisi	12 kali pertahun																		
	b. media baru seperti website (media online)	Setiap Hari																		
	c. Melalui Tradisional seperti;pertunjukan rakyat	12 kali pertahun																		
	d. Media interpersonal seperti; saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan /atau	12 kali pertahun																		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	d. Media interpersonal seperti; saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan /atau	12 kali pertahun																	
	e. Media luar ruang seperti; bulletin, leaflet,booklet, brosur,spanduk dan baliho	12 kali pertahun																	
2	a. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)																		
	b. cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	50%																	
II	IKK (Indikator Kinerja Kunci) PP 6/2008 Komunikasi dan Informatika		Jumlah jaringan komunikasi																
			Rasio wartel/wartel terhadap penduduk																
			Jumlah surat kabar nasional/ lokal																
			Jumlah penyiaran radio /TV lokal																

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Bekasi

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS FUNGSI DINAS KOMINFOSTANDI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan TIK			Peningkatan jumlah titik bekasikotamaju@wifi di area publik dan Perangkat Daerah				101 titik	300 titik										
				Peningkatan panjang Fiber Optik				20 km	127 km										
				Implementasi Layanan Cloud Computing				0 aplikasi	10 aplikasi										
				Tercapainya Sertifikasi ISO 27001(Keamanan Informasi)				1 jumlah	1 jumlah										
				Tercapainya Standardisasi TIA-942				0 jumlah	1 jumlah										
2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan e government untuk perluasan aksesibilitas informasi dan layanan publik;			Prosentase Perangkat Daerah yang terintegrasi				20%	100%										
				Prosentase E-government/aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan				66%	100%										

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS FUNGSI DINAS KOMINFOSTANDI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Prosentase layanan informasi pemerintahan				55%	100%										
3	Meningkatnya kualitas isi informasi			Prosentase informasi akurat				25%	49.3%										
4	Meningkatnya volume diseminasi dan distribusi informasi	12x/tahun		media massa				96 kali /tahun	144 kali /tahun			72							
		Setiap hari		media baru (online dan sosial)				292 kali /tahun	365 kali /tahun			0							
		12x/tahun		media tradisional				1 kali	2 kali			1							
		12x/tahun		media interpersonal				0 kali /tahun	12 kali /tahun			0							
		12x/tahun		media luar ruang				10 kali /tahun	12 kali /tahun			12							
5	Meningkatnya partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat	50%		prosentase Peningkatan cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tk. Kecamatan				25%	50%										
6	Meningkatnya kualitas SDM (pranata kehumasan dan arsiparis)			prosentase SDM bersertifikat kehumasan/arsiparis				0%	50%										

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS FUNGSI DINAS KOMINFOSTANDI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN TAHUN					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Meningkatnya kualitas layanan publik Pemerintah melalui fasilitasi pertimbangan teknis pembangunan manara telekomunikasi			Rekomendasi koordinat penempatan menara telekomunikasi				200 rekom	300 rekom											
8	ketersediaan data statistik di kota bekasi			Menyiapkan bahan penyusunan data statistik				1 dokumen	2 dokumen											
				Data statistik melalui E-Book				12 skpd	47 skpd											

Dalam tabel tersebut di atas dapat dilihat capaian target SPM (Standard Pelayanan Minimal) dan Target IKK (Indikator Kinerja Kunci) dimana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi ada beberapa yang melampaui target nasional ada yang sedikit dibawah namun secara keseluruhan memenuhi target.

Pendanaan anggaran dan realisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian per tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, antara tahun 2017 sampai tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.2

Dalam Tabel 2.2 tersaji anggaran dan realisasi selama 5 tahun sebagai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Uraian	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.739.700.000	3.553.110.000												
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				640.000.000	1.020.000.000												
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				70.000.000	235.000.000												
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40.000.000	50.000.000												
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				126.500.000	170.000.000												
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				6.851.638.000	37.230.000.000												
7	Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi				600.000.000	2.100.000.000												
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				1.413.300.000	5.050.000.000												
9	Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media				2.060.257.000	6.886.000.000												
10	Program Pengembangan Data dan Informasi				0	1.050.000.000												
	TOTAL ANGGARAN				14.541.395.000	57.344.110.000												

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan/Strenght (S)

- Struktur Organisasi yang cukup handal, dalam merespon kebutuhan manajerial. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang merupakan Dinas dengan Tipe A yang merupakan penggabungan dari beberapa urusan dan kewenangan yaitu urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang awalnya di Bagian Telematika, urusan kehumasan dan persandian pada Bagian Humas, urusan pos dan telekomunikasi pada Dinas Perhubungan serta urusan statistik.
- Dukungan dan Komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan e-Government cukup kuat
- Team Work yang terbangun menjadi motivasi yang kuat
- Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengembangan TIK
- Trend peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Budaya penggunaan aplikasi *electronic government (egov)* dalam Pemerintahan bukan merupakan hal baru di Pemerintah Kota Bekasi sehingga akan memudahkan pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

b. Kelemahan/Weakness (W)

- Keterbatasan jumlah SDM dan skill yang sesuai dengan kebutuhan.
- Belum adanya perencanaan pendanaan secara komperhensif seiring penancangan Bekasi Smart City. Konsep Smart City menjadi sebuah trend di lingkungan Pemerintahan Indonesia dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan pola penganggaran yang berbeda dari yang telah ada pada umumnya. Tentunya hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri karena penganggaran mengacu pada RPJMD yang disusun pada

tahun 2013, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut.

- Aplikasi e-Government belum terintegrasi. Meskipun Kota Bekasi telah cukup lama menerapkan budaya penggunaan e Government dalam pemerintahan namun secara umum belum terintegrasi.
- Infrastruktur komunikasi data utama masih terbatas. Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga 2016 telah memiliki infrastruktur komunikasi data utama namun masih sangat terbatas (jangkauan 19 km) dan belum menjangkau ke seluruh Perangkat Daerah dan fasilitas strategis milik pemerintah lainnya yang membutuhkan jangkauan 130Km.
- Belum tersedianya sumber data dan pelaporan yang kuat bagi perencanaan pembangunan serta kebutuhan informasi bagi masyarakat Kota Bekasi. Big Data merupakan sebuah keharusan dalam mencapai Open Government Data yang dinamis dan akurat.
- Kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan dengan segera dalam upaya mencapai sasaran dan target akhir pada RPJMD yang masih rendah. Diskominfostandi merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk melalui penggabungan beberapa urusan yang sebelumnya terpisah dari jenis Perangkat Daerah yang berbeda yaitu bersifat koordinatif dan fungsional, pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan pelaksana Urusan Pemerintahan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang/Opportunities (O)

- Perkembangan dan kebutuhan pemerintah akan Teknologi Informasi menjadikannya sebagai salah satu indikator akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- Semangat daerah mewujudkan jatidiri sebagai Smart City.
- Arus informasi, aspirasi diberi akses luas akan menguatkan partisipasi masyarakat.
- Tersedianya aplikasi dari pemerintah pusat dan sharing aplikasi antar Pemerintah
- Terbukanya peluang dalam berkolaborasi dengan pebisnis (G To B) dengan dibangunnya beberapa infrastruktur penunjang perkotaan yang memudahkan transportasi dari Kota Bekasi ke Jakarta yaitu LRT dan Jalan Layang Non Tol Becakayu akan memudahkan mobilitas

penduduk antara Jakarta-Bekasi dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga akan meningkatkan peluang usaha baru untuk menjawab kebutuhan tingkat hunian yang jumlahnya meningkat tajam di Jakarta;

- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi Tahun 2016 menjadi 79,95 dengan rata-rata pertumbuhan 0,68% pertahun, peningkatan Angka Harapan Hidup saat lahir menjadi 74,55 tahun dan pertumbuhan 3,83% pengeluaran Perkapita/Tahun disesuaikan menjadi Rp. 15.236.000,- merupakan indikator yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang untuk tinggal di Kota Bekasi.

b. Ancaman/Treaths (T)

- Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah.
- Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara masif dan cepat memerlukan kecermatan pemilihan perangkatnya dan penggunaannya secara tepat dan cerdas.
- Keterbukaan informasi publik belum diimbangi dengan budaya masyarakat yang bijak menggunakan perangkat elektronik.
- Masyarakat Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota merupakan masyarakat heterogen dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dapat berpotensi menjadi masyarakat yang radikal progresif yang berujung pada timbulnya konflik yang meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, dan mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
- Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan populasi tidak terkendali yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja baru akan memicu timbulnya permasalahan peningkatan jumlah pengangguran.
- Kondisi geografis, penurunan luas lahan terbuka hijau dan pembangunan kota begitu pesat dapat menimbulkan permasalahan persampahan, banjir, kemacetan.

Faktor Pendorong Keberhasilan

Kota Bekasi telah menjelma menjadi kota megapolitan yang mengandalkan jasa dan perdagangan sebagai motor penggerak roda perekonomiannya, dan menyadari hal tersebut maka sesuai dengan urusan serta kewenangan yang dimilikinya, Diskominfostandi berkomitmen menjadi enabler bagi pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berbasis data dan teknologi informasi dalam menyediakan layanan publik yang tepat, cepat, adaptif dan solutif bagi masyarakat Kota Bekasi. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfostandi untuk merealisasi komitmen tersebut melalui faktor-faktor faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut :

1. Keterpaduan perencanaan bersama Perangkat Daerah lainnya dalam mewujudkan Bekasi Smart City.
2. Kerjasama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh aparatur Diskominfostandi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berbasis data dan teknologi informasi melalui semangat Diskominfostandi KITA (Keren, Akuntabel, Teamwork dan Asik).
3. Kemitraan strategis yang harmonis dengan media massa baik cetak maupun elektronik serta lembaga-lembaga masyarakat dan komunitas yang ada di Kota Bekasi dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat.
4. Terintegrasinya berbagai aplikasi pemerintahan serta layanan berbasis e-Government, serta inovasi-inovasi berkelanjutan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Tersedianya data-data dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.
6. Dibangunnya jalur komunikasi publik langsung antara Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah terkait dengan masyarakat untuk penjangkauan aspirasi dan pemecahan masalah secara interaktif yang didukung sarana Informasi (surat kabar, radio dan TV) sebagai media komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
7. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam program peningkatan kompetensi aparatur.

Tantangan yang dihadapi Diskominfostandi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam pengembangan e-Government dan TIK, informasi dan komunikasi publik serta statistik dan persandian;
2. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk

keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik

3. Tinggi kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. Penguatan peran PPID Utama dan PPID Pembantu dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
5. Perkembangan e-Government secara parsial sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal.

Peluang pengembangan pelayanan Diskominfo standi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistik dan persandian;
2. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan media penyebaran informasi publik yang efektif;
3. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
4. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian;
5. Penyediaan berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat sebagai solusi dari penerapan Bekasi Smart City.
6. Fasilitasi kebutuhan masyarakat dalam membuka akses informasi publik melalui Bekasi Open Government Data.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk teratasi, permasalahan itu antara lain

1. Belum optimalnya informasi dan komunikasi publik.
2. Belum optimalnya pemanfaatan e-government Perangkat Daerah.
3. Infrastruktur jaringan komunikasi data belum mencakup seluruh Perangkat Daerah dan fasilitas strategis milik Pemerintah lainnya.
4. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan infrastruktur yang ada.
5. Belum optimalnya KIM.
6. Belum terbentuknya Radio Kota Bekasi sebagai LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)

3.2. Telaahan terkait Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sebagai visi Pemerintah Kota Bekasi 2013-2018 adalah “BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”, yang bermakna, sebagai berikut:

1. “Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan Kota yang maju.
2. “Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
3. “Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan

dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Adapun misi Pemerintah Kota Bekasi adalah :

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan Kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Keterkaitan DiskominfoStandi adalah dengan Misi (1) yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan Misi (2) yaitu membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan Kota, yang dituangkan pencapaian melalui program prioritas pembangunan, sebagai berikut :

NO	PROGRAM	NO	INDIKATOR
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Prosentase Pencapaian Road Map e-Government
		2	Prosentase Perangkat Daerah yang sudah menerapkan e-Government
		3	Prosentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi
		4	Prosentase Keterbukaan Informasi Pengadaan
		5	Prosentase Perangkat Daerah yang memenuhi standar tata kelola e-government
		6	Prosentase pencapaian Rencana Pengembangan Kota Cerdas
		7	Prosentase Partisipasi Publik dalam pembangunan TIK
		8	Prosentasi fasilitas umum yang sudah memiliki wifi
		9	Prosentase penggunaan fasilitas data centre oleh perangkat Daerah
		10	Prosentase konektifitas jaringan Komunikasi
		11	Prosentase jenis pelanggaran Keamanan Informasi yg berhasil dideteksi
		12	Prosentase layanan pengaduan masyarakat

		13	secara online yang ditindaklanjuti tepat
		14	Prosentase Penerapan Data terenskripsi
		15	Prosentase pemenuhan informasi pemerintah pada Patriot Operation Centre
		16	Persentase Tersedianya pelayanan informasi
		17	Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan
		18	IKM Mengenai Pelayanan Prima Kehumasan SKPD Pemkot Bekasi
		18	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2	Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	1	Prosentase tersedianya pelayanan Informasi dan Komunikasi di ruang publik
3	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1	Prosentase Informasi Tepat sasaran Kepada Masyarakat
		2	Peningkatan Pengunjung Website Pemerintah Kota Bekasi
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
		2	Prosentase peningkatan Kualitas KIM
		3	Prosentase Informasi yang telah di kualifikasikan
		4	Prosentase Perangkat Daerah yang telah melakukan open Data Government
5	Program Pengembangan Data /Informasi	1	Prosentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaru
		2	Prosentase Jumlah data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbaru

3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

a. Keterkaitan Renstra Diskominfostandi dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Indonesia Informatif Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, Yang Merakyat Dan Ramah Lingkungan, Dalam Rangka NKRI”.

Adapun Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI.

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Mengacu Misi tersebut maka keterkaitan dengan Diskominfostandi terdapat misi (1), (2) dan (4), yang dituangkan dalam target pencapaian kinerja layanan dalam renstra yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- b. Selanjutnya untuk menyelaraskan pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Diskominfostandi merujuk kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat Yang Mandiri Dan Beretika Melalui Komunikasi Dan Informatika”.

Adapun Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan profesionalisme Aparatur bidang komunikasi dan informatika yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan berkembangnya e-literacy masyarakat
3. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan, penyelenggaraan jasa pos, dan telekomunikasi.

Dengan dinamika perkembangan urusan Ketelematikaan, Kehumasan, dan Telekomunikasi sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bekasi meskipun dalam dokumen perencanaan yang terpisah (Renstra Sekretariat Daerah dan Renstra Dinas Perhubungan) telah merujuk kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dan sejak ditetapkannya Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2016, maka dalam penyusunan Renstra Diskominfostandi urusan Ketelematikaan, Kehumasan, dan Telekomunikasi menjadi sebuah kesatuan perencanaan yang utuh dengan tetap merujuk pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai wujud sinergitas pembangunan, melalui perencanaan program kegiatan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media
- b. Terlaksananya pemberdayaan potensi lembaga komunikasi masyarakat
- c. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan ketrampilan bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat.
- d. Tersedianya aplikasi pendukung e-government;
- e. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.

3.4 Telaahan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2009-2029 berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dalam beberapa pasal secara urgensi mengatur yang menyangkut Komunikasi dan Informatika. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 8 dalam huruf (b) yaitu :

Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) bersama yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya.

2. Pasal 21 dalam ayat (3) huruf c yaitu :

Rencana Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi

3. Pasal 27 yaitu :

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi seperti dalam pasal 21 ayat (3) huruf c adalah meliputi peningkatan

jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah.

- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat alat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
 - (3) Prasarana telematika yang dikembangkan, meliputi Sistem kabel, Sistem seluler dan Sistem satelite.
 - (4) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana dan prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Pasal 63 dalam ayat (1) yaitu :
- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana energi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air, serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi,
5. Pasal 63 dalam ayat (4) yaitu :
- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi dimaksud ayat (1) adalah peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keselamatan dan keamanan aktivitas kawasan disekitarnya, serta unsur penataan ruang udara sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Penataan Menara Telekomunikasi menjadi sebuah langkah strategis mengingat kebutuhan masyarakat akan percepatan informasi yang berdampak pada tinggi permintaan pembangunan Menara di Kota Bekasi, Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan bagi Diskominfostandi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya dalam rangka penataan, monitoring dan evaluasi perkembangan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi, telaahan Renstra Kominfo dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, maka isu-isu strategis Diskominfo Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan TIK;
2. Sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government untuk perluasan aksesibilitas informasi dan layanan publik;
3. Peningkatan kualitas isi informasi;
4. Diseminasi dan distribusi informasi;
5. Partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat
6. Integritas dan peningkatan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi
7. Keterbukaan Pemerintah Kota Bekasi melalui ketersediaan data di kota bekasi;
8. Penataan Menara Telekomunikasi.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tak terpisahkan dengan **Visi Pemerintah Kota Bekasi** yaitu BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN . Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam minimal dua tahun mendatang. Dengan pertimbangan Tugas dan Fungsi, maka Visi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi yang Informatif, Kreatif, Akuntabel berbasis Tehnologi Informasi”**

Misi yang ditetapkan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan E_Government;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana Teknologi dan Informasi.
3. Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi kepada Masyarakat serta Promosi Potensi Daerah;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Tujuan merupakan uraian dari misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang akan dicapai pada 2 (dua) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan TIK	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK dan Pusat Data
2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan e government untuk perluasan aksesibilitas informasi dan layanan publik;	Terwujudnya integrasi berbasis e government dalam menunjang Pelayanan Informasi
3	Meningkatnya kualitas isi informasi	Terwujudnya isi Informasi yang berkualitas
4	Meningkatnya volume diseminasi dan distribusi informasi	Terwujudnya peningkatan kuantitas penyebaran informasi
5	Meningkatnya partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat	Terwujudnya peningkatan partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat
6	Meningkatnya kualitas SDM (pranata kehumasan dan arsiparis)	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM
7	Meningkatnya kualitas layanan publik Pemerintah melalui fasilitasi pertimbangan teknis pembangunan manara telekomunikasi	Terselenggaranya fasilitasi pertimbangan teknis (koordinat penempatan) pembangunan manara telekomunikasi

8	ketersediaan data statistik di kota bekasi	Terwujudnya sarana prasarana yang terintegrasi
---	--	--

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian beserta Indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
Kota Bekasi Tahun 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RENSTRA
					tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan TIK	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK dan Pusat Data	Peningkatan jumlah titik bekasikotamaju@wifi di area publik dan Perangkat Daerah	titik					101	300	
		Peningkatan panjang Fiber Optik	km					20	127	
		Implementasi Layanan Cloud Computing untuk layanan publik	aplikasi					0	10	
		Tercapainya Sertifikasi ISO 27001 (Keamanan Informasi)	jumlah					1	1	
		Tercapainya Standardisasi TIA-942	jumlah					0	1	
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan e government untuk perluasan aksesibilitas informasi dan layanan publik;	Terwujudnya integrasi berbasis e government dalam menunjang Pelayanan Informasi	Prosentase Aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	%					20	100	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RENSTRA
					tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Prosentase E-government/aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan	%					66	100	
		Prosentase layanan informasi pemerintahan	%					55	100	
Meningkatnya kualitas isi informasi	Terwujudnya isi Informasi yang berkualitas	Prosentase informasi akurat	%					24	49.3	
Meningkatnya diseminasi dan distribusi informasi	Terwujudnya peningkatan kuantitas penyebaran informasi	media massa	kali/tahun					96	144	
		media baru (online dan sosial)	kali/tahun					292	365	
		media tradisional	kali/tahun					1	2	
		media interpersonal	kali/tahun					0	12	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RENSTRA
					tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	
					6	7	8	9	10	
		media luar ruang	kali/ tahun					10	12	
Meningkatnya partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat	Terwujudnya peningkatan partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat	prosentase Peningkatan cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tk. Kecamatan	%					25	50	
Meningkatnya kualitas SDM	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM	prosentase SDM bersertifikat di bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan						0	25	
Meningkatnya kualitas penataan menara telekomunikasi	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi serta pertimbangan teknis (koordinat penempatan) pembangunan menara telekomunikasi	Rekomendasi koordinat penempatan menara telekomunikasi	titik					200	300	
Ketersediaan data statistik di kota bekasi	Terwujudnya sarana prasarana yang terintegrasi	Menyiapkan bahan penyusunan data statistik	Jumlah dokumen					1	2	
		Data statistik melalui E-Book	Jumlah SKPD					12	47	

4.3 Strategi dan Kebijakan

ANALISIS SWOT

Faktor Internal				Faktor Eksternal			
No	Kekuatan / Strength (S)	No	Kelemahan / Weakness (W)	No	Peluang / Opportunity (O)	No	Ancaman / Threat (T)
1	Struktur Organisasi cukup handal dalam merespon kebutuhan manajerial	1	Keterbatasan jumlah SDM dan skill yang sesuai dengan kebutuhan	1	Era teknologi informasi telekomunikasi sudah menjadi indikator akuntabilitas pemerintah daerah	1	Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah sehingga berpotensi meningkatnya komplain masyarakat
2	Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan E-Government	2	Belum ada perencanaan pendanaan dari pemerintah (SKPD baru)	2	Semangat daerah dan masyarakat dalam mewujudkan jati diri Smart City	2	Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan memerlukan pemilihan perangkat dan penggunaan secara cerdas dan cepat
3	Team work yang kuat	3	Sistem kerja belum terintegrasi	3	Arus informasi dan aspirasi yang diberi akses luas akan menguatkan partisipasi masyarakat	3	Keterbukaan informasi publik belum diimbangi dengan budaya masyarakat yang bijak dalam menggunakan perangkat elektronik cerdas
4	Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengembangan TIK	4	Infrastuktur IT yang tersedia masih terbatas	4	Tersedianya aplikasi dari pemerintah pusat dan sharing aplikasi antar daerah	4	Masyarakat Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota merupakan masyarakat heterogen yang dapat berpotensi konflik sosial
5	Kemampuan pembiayaan	5	belum tersedianya sumber data dan pelaporan yang kuat	5	Terbukanya peluang dalam berkolaborasi dengan pebisnis (G To B)	5	Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan populasi tidak terkendali yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja baru akan memicu timbulnya permasalahan peningkatan jumlah pengangguran

6	Penggunaan aplikasi <i>electronic government</i> (egov) telah membudaya dalam Pemerintahan	6	Kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan dengan segera dalam upaya mencapai sasaran dan target akhir pada RPJMD yang masih rendah	6	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi	6	Kondisi geografis, penurunan luas lahan terbuka hijau dan pembangunan kota begitu pesat dapat menimbulkan permasalahan persampahan, banjir, kemacetan
---	--	---	---	---	--	---	---

MATRIKS EXTERNAL FACTORS EVALUATION (EFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
PELUANG				
1	Era teknologi informasi telekomunikasi sudah menjadi indikator akuntabilitas pemerintah daerah	4	0,12	0,480
2	Semangat daerah dan masyarakat dalam mewujudkan jati diri Smart City	4	0,11	0,440
3	Arus informasi dan aspirasi yang diberi akses luas akan menguatkan partisipasi masyarakat	2	0,09	0,180
4	Tersedianya aplikasi dari pemerintah pusat dan sharing aplikasi antar daerah	3	0,08	0,240
5	Terbukanya peluang dalam berkolaborasi dengan pebisnis (G To B)	2	0,08	0,160
6	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi	4	0,09	0,360
NILAI			0,57	1,860

MATRIKS INTERNAL FACTORS EVALUATION (IFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
KEKUATAN				
1	Struktur Organisasi cukup handal dalam merespon kebutuhan manajerial	3	0,07	0,210
2	Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan E-Government	4	0,07	0,280
3	Team work yang kuat	2	0,07	0,140
4	Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengembangan TIK	4	0,08	0,320
5	Kemampuan pembiayaan	3	0,07	0,210
6	Penggunaan aplikasi <i>electronic government</i> (egov) telah membudaya dalam Pemerintahan	4	0,08	0,320
NILAI			0,44	1,480

MATRIKS EXTERNAL FACTORS EVALUATION (EFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
	ANCAMAN			
1	Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah sehingga berpotensi meningkatnya komplain masyarakat	2	0,08	0,160
2	Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan memerlukan pemilihan perangkat dan penggunaan secara cerdas dan cepat	2	0,07	0,140
3	Keterbukaan informasi publik belum diimbangi dengan budaya masyarakat yang bijak dalam menggunakan perangkat elektronik cerdas	3	0,07	0,210
4	Masyarakat Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota merupakan masyarakat heterogen yang dapat berpotensi konflik sosial	2	0,07	0,140
5	Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan populasi tidak terkendali yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja baru akan memicu timbulnya permasalahan peningkatan jumlah pengangguran	2	0,07	0,140
6	Kondisi geografis, penurunan luas lahan terbuka hijau dan pembangunan kota begitu pesat dapat menimbulkan permasalahan persampahan, banjir, kemacetan	4	0,07	0,280
	NILAI		0,43	1,070
	TOTAL NILAI		1,00	2,930

MATRIKS INTERNAL FACTORS EVALUATION (IFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
	KELEMAHAN			
1	Keterbatasan jumlah SDM dan skill yang sesuai dengan kebutuhan	2	0,08	0,160
2	Belum ada perencanaan pendanaan dari pemerintah (SKPD baru)	2	0,10	0,200
3	Sistem kerja belum terintegrasi	1	0,10	0,100
4	Infrastuktur IT yang tersedia masih terbatas	2	0,10	0,200
5	belum tersedianya sumber data dan pelaporan yang kuat	3	0,10	0,300
6	Kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan dengan segera dalam upaya mencapai sasaran dan target akhir pada RPJMD yang masih rendah	2	0,08	0,160
	NILAI		0,56	1,120
	TOTAL NILAI		1,00	2,600

PELUANG

Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang

Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil

Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

TANTANGAN

Skala 4= Merupakan TANTANGAN berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan TANTANGAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan TANTANGAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan TANTANGAN berskala besar

Kekuatan

Skala 4= Merupakan kekuatan berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan kekuatan berskala sedang

Skala 2= Merupakan kekuatan berskala kecil

Skala 1= Merupakan kekuatan berskala sangat kecil/tidak ada

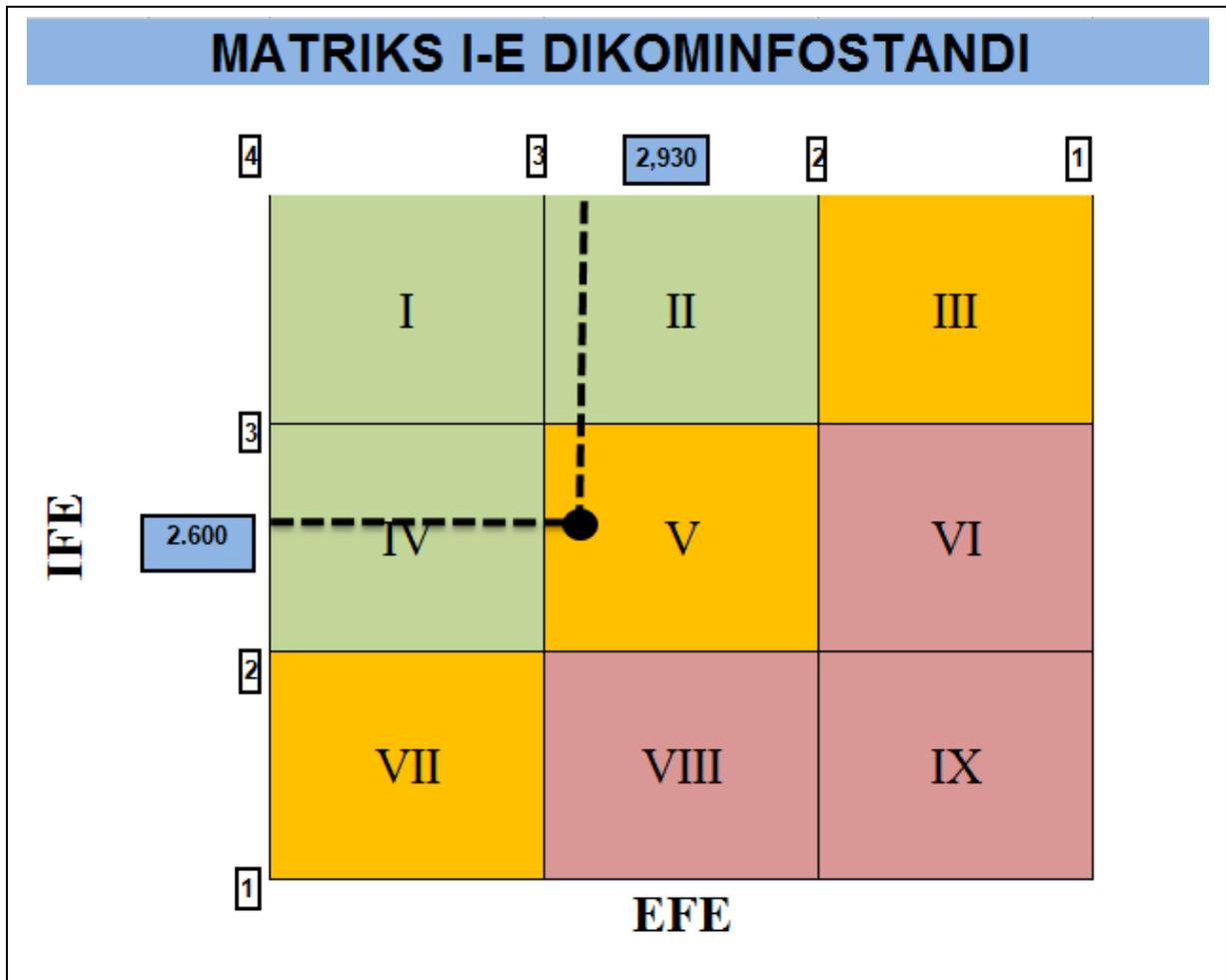
Kelemahan

Skala 4= Merupakan kelemahan berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan kelemahan berskala kecil

Skala 2= Merupakan kelemahan berskala sedang

Skala 1= Merupakan kelemahan berskala besar



Berdasarkan tabel di atas maka posisi Diskominfostandi berada dalam kuadran V yang artinya dalam posisi Grow and Build.

Hal ini bermakna bahwa sebagai sebuah Dinas yang baru terbentuk Diskominfostandi perlu melakukan penguatan internal sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam Pengembangan e-Government dan infrastruktur jaringan, pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, serta Pengembangan Statistik dan Persandian di Kota Bekasi, dengan menerapkan berbagai strategi, sebagai berikut :

No	Urutan Strategi	Nilai
1	Implementasi kebijakan pengembangan TIK	6,58
2	Pembentukan Tim dan penerapan Smart City	6,42
8	Pembangunan infrastruktur IT dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan swasta	6,30
6	Penyusunan Decision Support System dan Analitical System	6,21
16	Forum komunikasi publik antara Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah terkait dengan masyarakat untuk penjangkaran aspirasi dan pemecahan masalah secara interaktif	6,19
21	Penguatan peran tim PPID Utama, PPID Pembantu, Media Massa dan Kelompok Informasi masyarakat dalam rangka membentuk opini yang positif terhadap masyarakat	6,16

11	Penyusunan Bekasi Open Government Data	6,04
18	Pembangunan Sistem Informasi Analitik yang terhubung dengan smart device berteknologi IoT dan M2M di lokasi-lokasi rawan permasalahan perkotaan	6,03
No	Urutan Strategi	Nilai
4	Kerjasama dengan pebisnis dalam pengembangan IT Kota Bekasi	5,92
13	Penyediaan informasi yang tepat dan cepat kepada masyarakat melalui Konsep Smart City/Patriot Operation Centre	5,67
14	Menyusun konsep pengembangan data dan informasi yang akan disampaikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan	5,31
10	Pengadaan dan penyiapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan	5,24
20	Penerapan sistem monitoring dan konsistensi terhadap hasil evaluasi sesuai aturan yang telah ditetapkan	5,20
19	Penyusunan pedoman pembangunan TIK di Kota Bekasi	5,09
3	Membangun kerjasama dengan pemerintah pusat terkait aplikasi	5,03
5	Pelibatan masyarakat (komunitas TIK, akademisi) dalam penyediaan dan akses informasi	4,91
9	Penguatan sistem pelaporan menggunakan aplikasi yang terintegrasi	4,82
17	Penjajagan dengan pelaku usaha, komunitas TIK dan KIM, serta mitra strategis dalam penciptaan lapangan kerja baru	4,78
12	Kerjasama antar Lembaga dalam pengembangan e Gov dan Smart City	4,74
7	Penyusunan perencanaan pendanaan pengembangan IT	4,69
15	Sosialisasi penggunaan internet sehat pada siswa SD dan SMP	4,68
22	Pencarian alternatif pembiayaan pengembangan TIK melalui CSR, dan alternatif penguatan infrastruktur melalui sharing infrastructure dan kontribusi	4,53
23	Transfer knowlegde/pelatihan menjadi kewajiban vendor penyedia dan diatur dalam klausul perjanjian	4,46

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Pertsandian Kota dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra dan Renja adapun program dan kegiatan dapat di lihat dalam tabel dibawah ini.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2017-2018

No	Program	No	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		5	Penyediaan Makanan dan Minuman
		6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
		7	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
		8	Penataan Arsip
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		2	Pengadaan Meubelair
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Olah Raga
		2	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Penyusunan laporan keuangan
		3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi

		2	Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi
		3	Pengadaan Perangkat VoIP
		4	Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi
		5	Pembangunan Jaringan Fiber Optik
		6	Penyusunan DED jaringan FO
		7	Penyusunan SOP pengelolaan TIK dan aplikasi E-Govt
		8	Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi
		9	Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi
		10	Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik
		11	Tata Kelola Keamanan Informasi
		12	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
		13	Pemeliharaan dan pengelolaan Layanan Informasi digital Kecamatan
		14	Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi
		15	Pengelolaan Aplikasi Perizinan E-PATEN website Kecamatan dan kelurahan
		16	Pengendalian E Government Pemerintah Kota Bekasi
		17	Decision Support System analitik
		18	Penyusunan standar format metadata (IT Library) SIM/Layanan Berbasis E Gov
		19	Pemetaan Application Programe Interface (API) dan ekosistem interoperabilitas sistem informasi dan layanan berbasis E- Gov Kota Bekasi
		20	Pengelolaan Workshop TIK Kota Bekasi
		21	Penerapan E Office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi
		22	Pengelolaan LPSE
		23	Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
		24	Pengembangan Integrated Waste Management Information System (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi) Kota Bekasi
		25	Manajemen Integrasi Data
		26	Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi
		27	Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD, DISNAKER DAN SETWAN
		28	Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center
		29	Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City
		30	Implementasi Kawasan Smart City
		31	Pelaporan dan Kliping berita online dan cetak
		32	pengelolaan alat persandian
		33	Penguatan Operator Transmisi Sandi (OTS)
		34	Pelatihan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik pemerintah
		35	Pembangunan Aplikasi Analisis Opini Publik
7	Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	1	Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Operator Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi
		2	Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi
		3	Pengadaan peralatan pengawasan menara telekomunikasi serta instrumen pendukung radio frekuensi dan telekomunikasi
		4	Rencana Induk jaringan telekomunikasi kota Bekasi
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
		2	Penyusunan profil Kota Bekasi

		3	Pembinaan KIM Kota Bekasi
		4	Pembinaan admin medsos SKPD
		5	Pembinaan komunitas film dan photography
		6	Peningkatan kapasitas ruang layanan PPID
		7	Pembinaan PPID pembantu
		8	Pengelolaan media online dan medsos
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Pembuatan aplikasi SIM PPID
		2	Bimbingan Teknis Jurnalistik Aparat
		3	Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017
		4	Festival seni pertunjukan tradisional
		5	Pembuatan jingle iklan dan mars Kota Bekasi
		6	Fasilitasi publikasi sektoral melalui multimedia
		7	literasi media ke masyarakat
		8	kemitraan kehumasan
		9	Pembuatan film dokumenter hasil pembangunan Kota Bekasi
		10	Pameran karya jurnalistik komunitas
		11	Studi kelayakan pengembangan stasiun radio dan TV lokal
		12	Sosialisasi Publikasi Pemillu
		13	Bimbingan Teknis Design Komunikasi Visual
		14	Sosialisasi SOP Pengaduan Online
		15	Pengembangan komunitas jurnalistik
		16	Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan
		17	Penguatan Fungsi PPID
		18	Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Aparatur SKPD
		19	Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku
		20	Pembuatan aplikasi penilaian sentimen publik
		21	Studi tingkat kepuasan masyarakat terhadap media pengaduan online
		22	Jajak pendapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
		23	Pembinaan Kehumasan
		24	Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers
		25	Kursus Singkat Kehumasan
		26	Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi dan Telepon
		27	Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi
		28	Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Pengelolaan sistem open data kota bekasi
		2	Penyusunan PDRB dan analisis potensi ekonomi
		3	Penyusunan Buku Statistik Indikator Makro Kota Bekasi
		4	Pengelolaan statistik sektoral berbasis WEB GIS City

Program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat dalam tabel 5.1 dibawah ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018 Kota Bekasi dapat dilihat dalam Tabel 6.1 dibawah ini.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan TIK	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK dan Pusat Data	Prosentase Pencapaian Road Map E-Goverment		%				95	100
	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan e - government untuk perluasan aksesibilitas informasi dan layanan publik;	Terwujudnya integrasi berbasis e government dalam menunjang Pelayanan Informasi		Prosentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi						
	Meningkatnya kualitas isi informasi	Terwujudnya isi Informasi yang berkualitas		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat						
				Prosentase pencapaian Rencana Pengembangan						

				Kota Cerdas						
				Prosentase Perangkat Daerah yang sudah menerapkan e-government						
				Prosentase jenis pelanggaran Keamanan Informasi yg berhasil dideteksi						
				Prosentase Penerapan Data terenskripsi						
				prosentase partisipasi publik dalam pembangunan TIK						
2	Meningkatnya volume diseminasi dan distribusi informasi	Terwujudnya peningkatan kuantitas penyebaran informasi	Prosentase jenis informasi publik yang dipublikasikan		%				100	100
				jumlah pemanfaatan media arus utama						
				prosentase kerjasama informasi media						
3	Meningkatnya partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat	Terwujudnya peningkatan partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat	IKM mengenai pelayanan prima kehumasan SKPD pemkot bekasi		%				75	80

	Meningkatnya kualitas SDM (pranata kehumasan dan arsiparis)	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM		Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)						
				Prosentase tersedianya pelayanan Informasi dan Komunikasi di ruang publik						
4	Meningkatnya kualitas layanan publik Pemerintah melalui fasilitasi pertimbangan teknis pembangunan manara telekomunikasi	Terselenggaranya fasilitasi pertimbangan teknis (koordinat penempatan) pembangunan manara telekomunikasi	Prosentase tersedianya pelayanan Informasi		%				82	90
				jumlah pemanfaatan media arus utama						
				prosentase kerjasama informasi media						
5	ketersediaan data statistik di kota bekasi	Terwujudnya sarana prasarana yang terintegrasi	Presentase jumlah data sekunder yang tervalidasi dan terbaru		%				45	50
			Prosentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaru		%				75	80

				Prosentase Perangkat Daerah yang telah melakukan open Data Government						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi tahun 2017- tahun 2018 ini berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi yang memuat tentang Program, Kegiatan dan Kebijakan serta Tujuan dan Sasaran untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dan juga sebagai pedoman penyusunan Renstra yang akan datang serta digunakan sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2017-2018 diharapkan menjadi koridor dalam pelaksanaan program dan pencapaian target sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi.